

JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 2, Januari 2017
E-ISSN 2527-7057, P-ISSN 2545-2683

MENJAGA EKSISTENSI PANCASILA DAN PENERAPANNYA BAGI MASYARAKAT DI ERA GLOBALISASI

Ambiro Puji Asmaroini, M.Pd
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
ambiroop@gmail.com

ABSTRACT

Pancasila is the basis of the state and outlook of the nation Indonesia. As the foundation of the State, Pancasila used as the basis to build the Unitary Republic of Indonesia. As an ideology of nation and state of Indonesia, Pancasila is the crystallization of the customs value, the value of cultural and religious values contained in the view of life in Indonesia.

Pancasila is the official philosophical foundation and nation's view of life. As the foundation of the State, Pancasila is used as the basis to build the Unitary Republic of Indonesia. As an ideology of nation and state of Indonesia, Pancasila is the crystalization of the custom value, cultural and religious values in the view of life in Indonesia

The value in Pancasila has a set of values, namely divinity, humanity, unity, democracy, and justice. The condition of Indonesia today can be identified by looking at the behavior and personality of Indonesian society, as reflected in daily behavior.

Globalization is not inevitable. Globalization makes all countries seemed limitless. For that we need Pancasila as the filter of globalization. The necessity of civilizing values of Pancasila is not just understanding, but must be lived and embodied in experiences by each individual and the whole society that foster awareness and the need to implement social, civic, and state based on Pancasila

Keywords: ideology, Pancasila, Globalization

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam

semesta, dan penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi (Sumarsono dkk 2007).

Pancasila merupakan dasar Negara bagi Negara kita. Sebagai

dasar Negara, Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nilai-nilai tersebut lahir dan melekat secara tidak sengaja pada nenek moyang kita.

Pancasila itu terdiri dari Panca dan Sila. Nama Panca diusulkan oleh Ir. Soekarno sedangkan nama Sila diusulkan oleh salah seorang ahli bahasa. Pancasila dirasakan sudah sempurna dan mencakup segala aspek pada Bangsa Indonesia.

Setelah puluhan tahun lahirnya Pancasila dari tahun 1945 hingga saat ini, Negara di dunia mengalami pengembangan yang pesat dalam berbagai bidang kehidupan. Masuknya era globalisasi menjadikan bangsa dunia hampir tidak memiliki batas. Dampak baik dan buruknya globalisasi tentunya mari kita kaji bersama dengan melandaskan Pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam menghadapi segala permasalahan seiring perkembangan zaman. Kondisi bangsa saat ini mencerminkan adanya penyimpangan dari Pancasila tidak sesuai dengan nilai

seharusnya. Namun masih ada upaya pelurusan kembali terhadap nilai-nilai Pancasila.

Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila, agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa.

PEMBAHASAN

1. Ideologi Pancasila dalam pemikiran radikal dan revolusioner

Perlu kita renungkan, Pancasila sebagai dasar Negara diwarnai oleh ketegangan, konflik, dan consensus bersama. Kondisi bangsa Indonesia yang dimasa kolonial selalu menempatkan warga Nusantara sebagai pihak yang terkalahkan banyak menginspirasi perumusan Pancasila. Para pendiri bangsa berhasil keluar dari rutinitas pandangan hidup bangsanya melalui

penalaran dan kontemplasi yang brilyan (Hariyono, 2014).

Kelemahan bangsa Indonesia yang nampak dalam menghadapi penguasa kolonial adalah lemahnya persatuan bangsa Indonesia. Perbedaan yang ada pada masyarakat sering dijadikan media pecah belah oleh penguasa kolonial. Warga pribumi di nusantara belum merasa dan menyadari dirinya sebagai sesama bangsa yang senasib dan seperjuangan. Sehingga beberapa tokoh pergerakan nasional, mulai dari Tan Malaka, Hatta dan Soekarno, melihat bahwa rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa inilah yang harus dikembangkan.

Perlakuan ketidakadilan yang diterima masyarakat nusantara menginspirasi adanya penghormatan terhadap ketidakadilan masyarakat pribumi yang diperlakukan tidak manusawi menuntut adanya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Secara kodratnya manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Setiap bentuk pemikiran, sistem hingga tindakan yang tidak menghargai dimensi

kemanusiaan dan keadilan bertentangan dengan prinsip Pancasila. Di alam prinsip Pancasila tidak membedakan manusia berdasarkan agama, ras, warna kulit atau budaya. Pandangan Pancasila mengakui adanya pluralism yang memungkinkan berkembangnya suatu nasionalisme yang inklusif.

Kehidupan masyarakat yang cukup memprihatinkan dari masyarakat pribumi akibat pemiskinan dan pembodohan oleh sistem kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Hanya melalui sistem yang humanis dan adil masyarakat Indonesia berpeluang untuk memperoleh kemakmuran. Masyarakat yang adil dan makmur bukanlah suatu mimpi yang diwujudkan tanpa dasar. Pancasila dirintis untuk menggapai tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur terwujud jika masyarakat Indonesia terus mewarisi dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang digali dari sumber religioitas. Eksistensi Tuhan sudah dikenal oleh masyarakat nusantara

dengan segala istilah dan ajaran. Toleransi terhadap perbedaan sikap banyak dijunjung oleh nenek moyang nusantara.

Berbagai nilai-nilai dasar tersebut mulai dirintis oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Pada saat Soekarno menyebutkan dan merumuskan dasar Negara yang ditawarkan dalam sidang BPUPKI tidak ada hadirin yang menolak. Berbagai nilai luhur tersebut sudah ada dan hidup di masyarakat nusantara serta diperkaya dengan pemikiran dunia yang modern.

Hariyono (2014) mengatakan bahwa kepentingan bangsa dan Negara selalu menempati posisi yang dominan dalam perumusan Pancasila sebagai dasar Negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Sejak 1 Juni 1945 hingga 18 Agustus 1945 para pendiri Negara sedang berdiskusi mendalam tentang *platform* kehidupan berbangsa dan bernegara. Persatuan bangsa menjadi pertimbangan utama. Berkat penggalan nilai-nilai luhur itulah Pancasila hingga kini masih relevan dan cocok bagi bangsa Indonesia.

Prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila tidak semuanya berasal dari asing. Pancasila juga tidak semuanya berasal dari warisan nusantara. Para pendiri Negara mengolah kembali warisan nusantara dan memperkaya dengan warisan dunia sehingga muncul suatu rumusan Pancasila yang sangat cerdas dan visioner. Dari perpaduan budaya global dan warisan budaya yang luhur itulah berhasil dirumuskan Pancasila sebagai suatu dasar Negara sekaligus pandangan hidup.

Kita semua menyadari bahwa Pancasila sebagai *Grundnorm/Staatsfundamentalnorm*, yaitu pokok kaidah fundamental Negara masih berada dalam tataran normative. Pokok fikiran Pancasila kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam membuat tatanan kehidupan dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan mulia pemerintahan Negara Indonesia didasari oleh empat hal yang tercantum di dalam

pembukaan UUD 1945 alenia keempat, yaitu:

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- 2) Memajukan kesejahteraan umum,
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Ideologi Pancasila dalam Perspektif Global

Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar Negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia, dimana Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila dijadikan sebagai tuntunan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

2.1 Pancasila Sebagai Ideologi

Ideologi memainkan peranan yang penting dalam proses dan memelihara integrasi nasional, terutama di Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia (Ubaidillah, 2000). Istilah ideologi berasal dari kata '*idea*' berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan '*logos*' berarti ilmu. Kata idea sendiri berasal dari bahasa Yunani '*eidos*' yang artinya bentuk. Selanjutnya ada kata '*idein*' yang artinya melihat. Dengan demikian secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham (Kaelan, 2005).

Kaelan (2005) menyatakan bahwa ideologi sebagai pandangan masyarakat memiliki karakteristik: (a) ideologi sering muncul dan berkembang dalam situasi kritis; (b) ideologi memiliki jangkauan yang luas, beragam, dan terprogram; (c) ideologi mencakup beberapa strata

pemikiran dan panutan; (d) ideologi memiliki pola pemikiran yang sistematis; (e) ideologi cenderung eksklusif, absolute dan universal; (f) ideologi memiliki sifat empiris dan normatif; (g) ideologi dapat dioperasionalkan dan didokumentasikan konseptualisasinya; (h) ideologi biasanya terjadi dalam gerakan-gerakan politik.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk Negara, dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan *kausa materialis* (asal bahan)

Pancasila (Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007).

Ideologi berkaitan dengan tertib sosial, dan tertib politik yang ada, berupaya untuk secara sadar sistematis mengubah, mempertahankan tertib masyarakat. Suatu pemikiran mendalam, menyeluruh, menjadi ideologi apabila pemikiran, gagasan-gagasan tersebut secara praktis difungsikan ke dalam lembaga-lembaga politik suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu Negara (Suparlan, 2012).

Pancasila sebagai ideologi nasional mengatasi faham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan agama. Sehingga semboyan ‘Bhineka Tungga Ika’ diterapkan bagi segala masyarakat Indonesia dalam kesatuan yang utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya meletakkan kepentingan bangsa dan Negara Indonesia ditempatkan dalam kedudukan utama di atas kepentingan yang lainnya.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia, tercantum di dalam

pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.2 Globalisasi

Globalisasi merupakan gejala mengglobalnya sosio-cultural antar bangsa sehingga kultur antar bangsa di dunia seolah-olah melebur menjadi kultur dunia (global). Akibatnya hubungan antar bangsa semakin dekat.

Globalisasi biasa dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi, spekulasi dalam pasar uang, meningkatnya arus modal lintas Negara, pemasaran massal, peanasan global, era perusahaan multinasional hilangnya batas-batas antar Negara dan kian melemahnya kekuasaan Negara (Budiono, dalam Suparlan 2012).

Arus globalisasi tidak mungkin dihentikan. Berjalannya globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyebabnya. Dampaknya juga tidak bisa dihindarkan. Bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia, globalisasi memiliki dampak positif dan negative.

Adapun dampak negative dan dampak positif globalisasi menurut Suparlan (2012) antara lain:

a. Dampak Positif Globalisasi bagi Indonesia

(1) Semangat kompetitif

Untuk mengikuti arus globalisasi suatu Negara dituntut mampu bersaing di dunia internasional.

(2) Kemudahan dan kenyamanan hidup

Globalisasi dengan kemajuan di bidang informasi, komunikasi dan transportasi telah memberi kemudahan dan kenyamanan masyarakat.

(3) Sikap toleransi dan solidaritas kemanusiaan

Informasi mengenai keprihatinan dan penderitaan

sejumlah manusia di suatu Negara, memotivasi pemerintah di Negara lain untuk ikut membantu meringankan penderitaan yang dirasakan sesamanya.

- (4) Kesadaran dalam kebersamaan

Toleransi dan solidaritas antar bangsa berkembang menjadi kesadaran dalam kebersamaan untuk mengatasi berbagai masalah, dimana ancaman dan bencana bagi keselamatan dunia sebagai satu-satunya planet tanpa tinggal bagi umat manusia.

- (5) Menumbuhkan sikap terbuka
Sikap terbuka ini untuk mengenal dan menghormati perbedaan, kelebihan, dalam kehidupan manusia sebagai individu maupun bangsa yang hidup di wilayah Negara lain.

- (6) Globalisasi memberi tawaran baru
Globalisasi memberikan tawaran baru berupa kesematan untuk mengakses ilmu pengetahuan seluas-

luasnya melalui jaringan internet

- (7) Terbukanya mobilitas sosial
Kemajuan transportasi mendorong mobilitas sosial yang semakin terbuka dimana jarak tidak lagi menjadi permasalahan.

b. Dampak Negatif Gobalisasi bagi Bangsa Indonesia

- (1) Pergeseran nilai

Sesuatu yang baru (nilai, teknologi, budaya, dan lainnya) dari asing secara tidak otomatis dapat diintegrasikan ke dalam kondisi individu atau masyarakat yang menerimanya.

- (2) Pertentangan nilai

Masuknya nilai-nilai baru dan asing yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur dari pandangan hidup masyarakat.

- (3) Perubahan gaya hidup (*Life style*)

- (4) Berkurangnya kedaulatan Negara

Pemerintah harus mengakui dan bekerja di suatu lingkungan dimana sebagian besar penyelesaian masalah harus dirumuskan dengan memperhatikan dunia global.

3. Nilai-Nilai yang terkandung dalam Pancasila

Berikut ini adalah nilai-nilai dalam lima sila Pancasila

Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah dimana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya. Masyarakat Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang.

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini menjelaskan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama dihadapan hukum.

Persatuan Indonesia

Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam sila ini menjelaskan tentang demokrasi, adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganannya, dan kejujuran bersama.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama, dan melindungi yang lemah.

Pancasila sebagai dasar Negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai ideologi bangsa, menurut Suko Wiyono (2013) memuat nilai-nilai/karakter bangsa Indonesia yang tercermin dalam sila-sila Pancasila sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kepercayaan dan Ketaqwaan kepada Tuh Yang Maha Esa; (2)

- kebebasan beragama dan berkepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang paling asasi bagi manusia; (3) toleransi di antara umat beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan (4) Kecintaan pada semua makhluk ciptaan Tuhan, khususnya makhluk manusia.
2. Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kecintaan kepada sesama manusia sesuai dengan prinsip bahwa kemanusiaan adalah satu adanya; (2) Kejujuran; (3) Kesamaderajatan manusia; (4) Keadilan; dan (5) Keadaban.
 3. Nilai-nilai Persatuan Indonesia: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Persatuan; (2) Kebersamaan; (3) Kecintaan pada bangsa; (4) Kecintaan pada tanah air; dan (5) Bhineka Tunggal Ika.
 4. Nilai-nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1) Kerakyatan; (2) Musyawarah mufakat; (3) Demokrasi; (4) Hikmat kebijaksanaan, dan (Perwakilan).
 5. Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: terkandung di dalamnya prinsip asasi (1)
- #### **4. Kondisi Masyarakat Indonesia saat ini dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila**
- Kondisi bangsa Indonesia saat ini dapat dikaji dan identifikasi dengan melihat perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia tercermin pada tingkah laku masyarakat Indonesia sehari-hari. Perilaku masyarakat Indonesia saat ini yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu:
- ##### **Penyimpangan sila pertama**
- Saat ini kita menjumpai generasi muda yang tidak bertaqwa kepada Tuhan YME. Misalnya: meninggalkan ibadah, melanggar peraturan agama, menganggap dirinya sebagai Tuhan atau Rasul, dan lain sebagainya.
- ##### **Penyimpangan sila kedua**

Sekarang ini kita temui diantara pemuda Indonesia yang tidak memanusiakan manusia lain sebagai mana mestinya. Misalnya: kasus pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dan lain sebagainya.

Penyimpangan sila ketiga

Memudarnya rasa persatuan dan kesatuan yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Misalnya: tawuran antar pelajar, bentrok antar warga seperti perang sampit, bentrok antar suku seperti kisah perang sampit, dan lain sebagainya.

Penyimpangan sila keempat

Demokrasi selayaknya dilaksanakan dengan sehat. Fenomena yang terjadi saat ini masih adanya *money politic* di kalangan masyarakat yang biasa dijumpai pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan bupati atau walikota.

Penyimpangan sila kelima

Selanjutnya mengenai keadilan, banyak fakta-fakta mengenai ketidakadilan yang dilakukan oleh generasi muda bangsa Indonesia saat ini. Tidak perlu jauh-jauh, saat ini dapat kita lihat pada kelompok belajar kita saja sebagai faktanya. Dalam kelompok belajar PPKN

misalnya, tugas PPKN membuat makalah secara kelompok ketidakadilan selalu kita rasakan. Hal tersebut karena sebenarnya yang mengerjakan tugas kelompok dari 8 anggota kelompok, hanya 3 orang saja dan yang lainnya tinggal nitip nama. Padahal ia menginginkan mendapatkan nilai yang sama. Sungguh ini adalah contoh kecil yang berada pada kehidupan para pelajar sehari-hari.

5. Upaya yang dilakukan Masyarakat Indonesia dalam Membudayakan Nilai-Nilai Pancasila

Sebelum memasuki upaya masyarakat Indonesia dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila maka perlu kita tahu fungsi dari Pancasila. Sri Untari (2012) menjabarkan fungsi Pancasila antara lain:

(1) Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa

Pancasila adalah kepribadian bangsa yang digali dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya bangsa Indonesia.

(2) Pancasila sebagai sistem filsafat
Pancasila bersifat obyektif ilmiah karena uraiannya bersifat logis dan dapat diterima oleh paham yang lain.

(3) Pancasila sebagai sumber nilai
Nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

(4) Pancasila sebagai sistem etika
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud etika Pancasila adalah etika yang mengacu dan bersumber pada nilai-nilai, norma Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa (Sri Untari, 2012).

(5) Pancasila sebagai paradigma keilmuan ekonomi, politik, hukum, dan pendidikan

(6) Pancasila sebagai ideologi terbuka
Menurut Winarno dalam Sri Untari (2012) disebut terbuka sebab ideologi Pancasila bersumber pada kondisi obyektif, konsep, prinsip, dan nilai-nilai orisinal masyarakat Indonesia sendiri.

Secara etimologis, istilah kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta *budhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *budhi* yang berarti budi atau akal, dengan demikian budaya berhubungan dengan budi atau akal (Suko Wiyono, 2013). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) budaya adalah (1) pikiran; akal budi; (2) adat-istiadat; (3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju); (4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat dalam Suko Wiyono (2013) kebudayaan ialah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan melalui belajar. Dalam artian seperti tersebut di atas maka dibedakan wujud kebudayaan itu sebagai berikut: (1) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks gagasan, nilai, norma peraturan dan sebagainya, (2) wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia

dalam masyarakat, (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Berdasarkan pengertian di atas maka pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari karakter bangsa Indonesia, berarti perwujudan nilai-nilai Pancasila itu dalam: (1) agasan, nilai, norma, dan peraturan, (2) aktivitas serta tindakan terpolad dari manusia, dan (3) wujud hasil cipta manusia.

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila tidak sekedar memahami saja, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam pengalamannya oleh setiap diri pribadi dan seluruh lapisan masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan, mempertajam perasaan, meningkatkan daya tahan, daya tangkal dan daya saing bangsa yang semuanya tercermin pada sikap tanggap dan perilaku masyarakat.

Pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila perlu diupayakan pada berbagai kelompok masyarakat baik kelompok profesi seperti tenaga kerja, notaris, guru dan pengacara, kelompok fungsional seperti wanita, pemuda, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan upaya sedemikian rupa, diharapkan terdapat penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila di berbagai bidang kehidupan bagi seluruh masyarakat. Berkaitan dengan upaya pembudayaan karakter bangsa yang bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila, maka pendapat Suko Wiyono (2013) berpendapat bahwa hal yang ingin dicapai dalam pembudayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi akan hak dan kewajiban sebagai pribadi, anggota keluarga/masyarakat, dan sebagai warga Negara.
- 2) Sebagai pribadi ia dapat bersikap dan bertindak laku sebagai insan hmba Tuhan, yang mampu menggunakan cipta, rasa, dan karsa secara tepat, sehingga dapat bersikap adil. Ia adalah seorang yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- 3) Sebagai anggota keluarga dan masyarakat ia mampu mendudukan dirinya secara tepat sesuai dengan fungsi dan

tugasnya. Ia faham dan mampu menempatkan hak dan kewajiban dalam hidup bersama.

- 4) Sebagai warga Negara ia diharapkan faham akan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, patuh melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang didasarkan atas kesadaran. Sebagai warga Negara mampu membawa diri secara tepat dalam behubungan dengan sesama warga Negara, dan dengan lembaga-lembaga kenegaraan.
- 5) Sebagai tenaga pembangunan maka ia memahami prinsip-prinsip dasar program dan peaksanaan pembangunan, baik pembangunan di daerah maupun pembangunan nasional. Ia faham kegiatan apa yang selayaknya dikerjakan dan diutamakan dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bahagia.

KESIMPULAN

Pancasila merupakan dasar Negara dan pandangan hidup bangsa Indoesia. Sebagai dasar Negara,

Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arus globalisasi tidak mungkin dihentikan. Berjalannya globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyebabnya. Dampaknya juga tidak bisa dihindarkan. Bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesi, globalisasi memiliki dampak positif dan negative.

Pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila perlu diupayakan. Diharapkan terdapat penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila di berbagai bidang kehidupan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hakim, Suparlan, dkk. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Hariyono. 2014. *Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*. Malang: Intans Publishing
- Kaelan, & Zubaidi, Ahmad. 2007. *Pendidikan*

Kewarganegaraan.
Yogyakarta: Paradigma

Kaelan. 2005. *Pendidikan Pancasila*.
Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Departemen Pendidikan Nasional.
2008. *Kamus Besar Bahasa*
Indonesia Pusat Bahasa.
Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama

Sri Untari. 2012. “*Pancasila dalam*
Kehidupan Berasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara”
dalam Margono (Ed).
Pendidikan Pancasila Topik
Aktual Kenegaraan dan
Kebangsaan. Malang:
Universitas Negeri Malang
(UM Press)

Sumarsono, dkk. 2007. *Pendidikan*
Kewarganegaraan. Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama

Ubaidiah, A, dkk. 2000. *Pendidikan*
kewarganegaraan (Civic
Education), DEmokrasi,
HAM, & Masyarakat
Madani. Jakarta: IAIN
Jakarta Press

Wiyono, Suko. 2013. *Reaktualisasi*
Pancasila dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara.
Malang: Universitas
Wisnuwardhana Malang
Press